

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan teknologi dan arus modernisasi telah menciptakan persaingan global yang semakin kompetitif. Kondisi ini setiap negara memiliki kewajiban produktivitas baik, sehingga memiliki daya saing yang mendukung keberhasilan pembangunan. Dalam konteks ini, tujuan pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pula untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari kualitas hidup secara menyeluruh (Firmansyah et al., 2022). Dalam tahapan pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM) memegang peranan kunci dalam menjamin keberlanjutan pembangunan suatu negara dalam jangka panjang (Althira et al. 2025). Guna melihat keberhasilan mutu SDM dapat diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

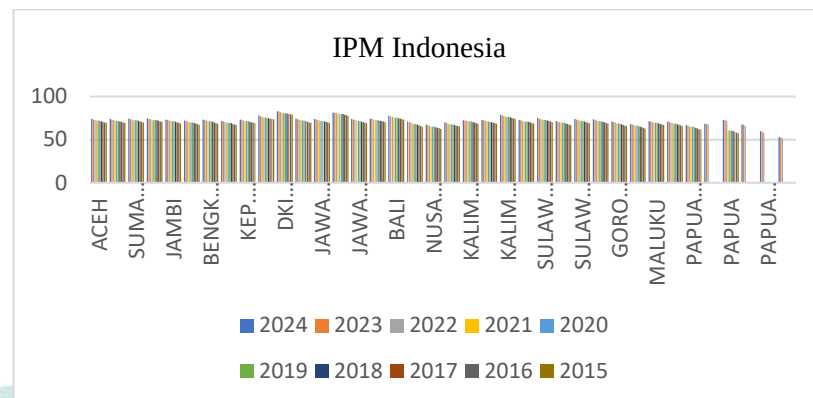
IPM secara resmi diluncurkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibawah naungan United Nation Development Programme (UNDP) dalam *Global Human Development Report*. IPM berfungsi sebagai standar pengukuran yang menyeluruh mengenai pembangunan kualitas hidup penduduk melalui tiga elemen dasar, meliputi derajat kesehatan,

tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Selain aspek ekonomi, IPM menjadikan kesehatan dan pendidikan sebagai indikator sentral. Pada dasarnya, taraf kesehatan, tingkat pendidikan, serta pendapatan per kapita merupakan penentu utama mutu sumber daya manusia suatu bangsa (Putri, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan tren positif, naik dari 69,55 pada 2015 hingga menyentuh 75,02 pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan seluruh komponennya, di mana Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir berada pada 74,15 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas mencapai 13,21 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang kini mencatatkan angka 8,85 tahun.

Berdasarkan pembaruan BPS, IPM DKI Jakarta berada di posisi tertinggi dengan capaian sebesar 83.08 pada 2024, posisi kedua diikuti DIY dengan nilai IPM sebesar 81.55, dan posisi terendah diikuti Papua Pegunungan dengan nilai IPM sebesar 53.42. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Intelligentia - Dignitas



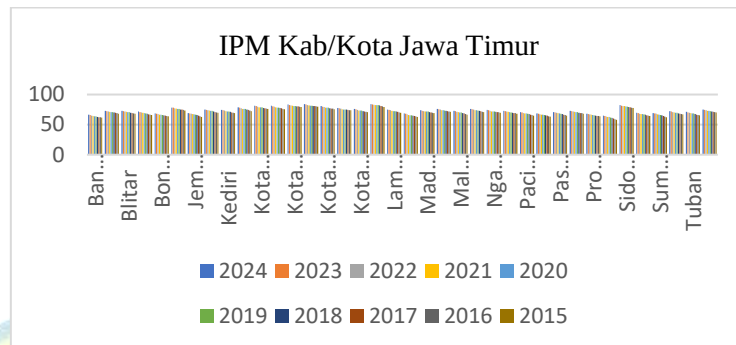
Gambar 1. 1 IPM Indonesia 2015-2024

Sumber: BPS (data diolah, 2026)

Terdapat empat tingkatan kategori IPM yang ditetapkan oleh BPS, yang merentang dari level rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), hingga sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Secara umum, tingginya nilai IPM mencerminkan peningkatan pendapatan warga, daya dukung pendidikan yang memadai, serta taraf kesehatan masyarakat yang lebih baik (Fauziah, 2024).

Merujuk pada laporan resmi BPS dengan pembaruan data mencapai tahun 2024, IPM Kota Surabaya menempati posisi teratas dengan 84.14 pada 2024, dan posisi terendah Kabupaten Sampang dengan IPM 64.65. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Intelligentia - Dignitas



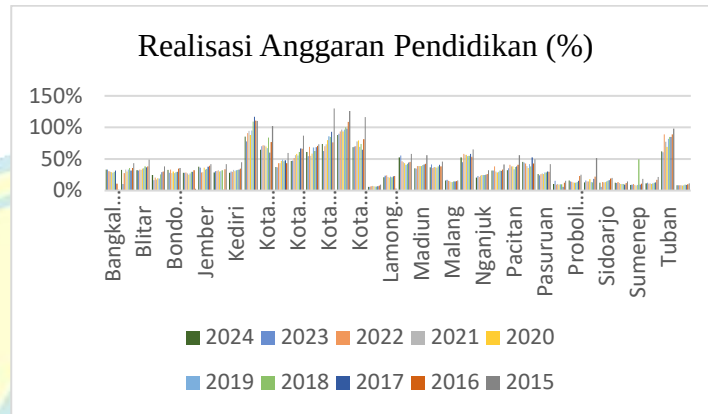
Gambar 1. 2 IPM Kabupaten/Kota Jawa Timur 2015-2024

Sumber: BPS (data diolah, 2026)

Melihat data tersebut, IPM seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2015-2024 bergerak secara fluktuasi. Fluktuasi ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan pembangunan pemerintah tingkat pusat dan daerah. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan capaian pembangunan antaradaerah di provinsi tersebut (Alif et al., 2021).

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam proses pembangunan, sehingga suatu bangsa wajib berinvestasi jangka panjang dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan nasional, misalnya dengan meningkatkan jumlah siswa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat lebih tinggi (Aulia et al., 2023). Untuk mencapai hal tersebut, terdapat satu langkah konkret ialah dengan meningkatkan anggaran pendidikan. Melalui mandate UUD 1945, negara mewajibkan pemenuhan anggaran pendidikan dengan porsi minimal 20% yang bersumber dari APBN dan APBD. Berikut data

realisasi anggaran pendidikan di kabupaten dan kota Jawa Timur selama periode 2015-2024.



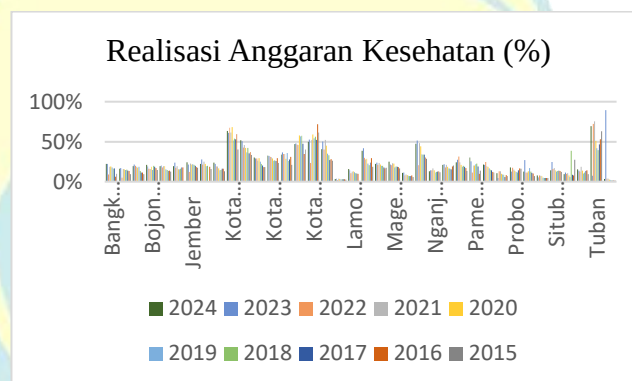
Gambar 1. 3 Realisasi Anggaran Pendidikan Kab/Kota Jawa Timur

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah, 2026)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas selama kurun waktu 2015-2024, pemerintah daerah di kabupaten dan kota Jawa Timur selalu konsisten merealisasikan anggaran pendidikan dengan presentase kenaikan yang bervariasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan lokal dan dinamika ekonomi regional. Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan merefleksikan keseriusan pemerintah daerah pada peningkatan mutu sumber daya manusia.

Di samping pengalokasian anggaran dalam lingkup pendidikan, pemerintah daerah di kabupaten dan kota Jawa Timur juga memprioritaskan anggaran khusus untuk sektor kesehatan. Alokasi anggaran tersebut pada dasarnya berguna untuk mengoptimalkan kuantitas dan juga kualitas pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada penduduk baik di kawasan perkotaan maupun di wilayah pedesaan, sehingga mempunyai keterjangkauan yang merata terhadap fasilitas kesehatan berkualitas tinggi (Simamora et al., 2025a). Berikut data anggaran kesehatan di kabupaten dan kota Jawa Timur selama periode 2015-2024.



Gambar 1. 4 Realisasi Anggaran Kesehatan Kab/Kota Jawa Timur

Sumber : djp.kemenkeu.go.id (data diolah, 2026)

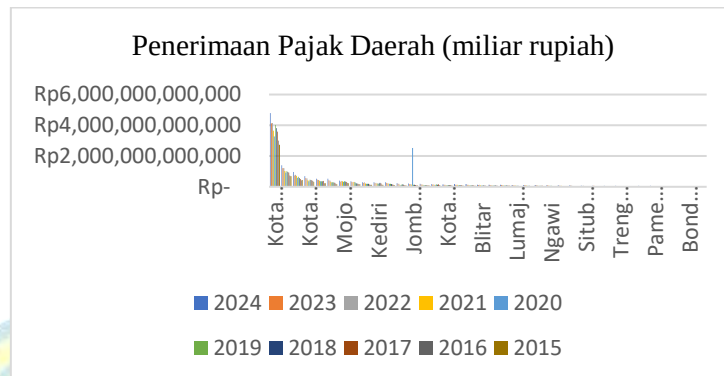
Gambar 1.4 ini juga menunjukkan bahwa anggaran kesehatan mengalami peningkatan yang beragam. Memperbaiki mutu sumber daya manusia di Indonesia dengan memberikan porsi anggaran yang besar untuk kesehatan merupakan bentuk komitmen jangka panjang yang membawa kebermanfaatan luas bagi masyarakat (Djohan et al., 2023a). Dengan demikian, kian tinggi anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah maka akan berpengaruh secara langsung terhadap IPM (Darwin, 2022).

Selain anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan, aspek krusial berpengaruh dalam

pembangunan ialah penerimaan pajak. Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan manusia, seperti peningkatan mutu pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pembiayaan program-program pembangunan yang berkelanjutan (Liyana et al., 2022).

Guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan reformasi ini ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan pajak yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah (Saragih, 2018).

Intelligentia - Dignitas



Gambar 1. 5 Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota Jawa Timur

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (data diolah, 2026)

Menurut data diatas, penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Jawa Timur selama kurun waktu 2015-2024, Kota Surabaya menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni meningkat dari Rp2.738,89 miliar rupiah pada tahun 2015 hingga Rp4.784,13 miliar rupiah pada tahun 2024. Kabupaten Sampang dengan capaian terendah sebesar Rp15.139,40 juta rupiah pada tahun 2015 dan meningkat Rp37.482,80 juta rupiah pada tahun 2024. Perbedaan tersebut mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang beragam dalam desentralisasi. Melalui kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan dan anggaran secara mandiri untuk mendukung pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan manusia di daerah (Alif et al., 2021).

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan

faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Dengan meningkatkan anggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan IPM secara signifikan (Aulia et al., 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Astri, Nikensari, and Kuncara (2013a), Ramadhani dan Siwi (2022), Simamora et al. (2025a), Mahulauw, Santosa, and Mahardika (2017a), dan Isyandi dan Aulia (2022) menyatakan bahwa terbukti memberikan dampak secara signifikan antara anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap IPM. Berbanding terbalik yang diungkapkan oleh Prastiwi dan Handayani (2021) belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif. Menurut Ernita (2022) belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya, menurut Aulia et al. (2023) pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Demikian pula dengan variabel penerimaan pajak daerah, berbagai studi telah diteliti oleh Saragih (2018), Putri dan Ribawati (2025) penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya menurut Suparlan dan Rispawati (2025) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap

IPM.

Meskipun studi telah banyak dilakukan terkait topik ini, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan variasi tingkat pembangunan dan kemampuan fiskal daerah yang cukup besar.

Dengan demikian, mempertimbangkan hal tersebut penelitian mengenai **“Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015–2024”** menjadi penting untuk memperkaya temuan empiris lebih mendalam serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan berfokus pada penguatan mutu pembangunan manusia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai

berikut:

- 1) Apakah ada pengaruh anggaran pendidikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2024?
- 2) Apakah ada pengaruh anggaran kesehatan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2024?
- 3) Apakah ada pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap IPM pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh anggaran pendidikan terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2024
- 2) Untuk menganalisis pengaruh anggaran kesehatan terhadap IPM di kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2015-2024
- 3) Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap IPM di kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2015-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

- 1) Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi

publik dan keuangan daerah, khususnya dalam kebijakan fiskal dan pembangunan manusia. Selain itu, temuan ini dapat berfungsi sebagai referensi akademik untuk penelitian lanjutan yang mengkaji seberapa efektif belanja daerah dan kapasitas fiskal untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam konteks wilayah dengan karakteristik ekonomi yang beragam seperti kabupaten dan kota di Jawa Timur.

2) Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperdalam literatur penulis terkait tata kelola fiskal daerah, khususnya terkait peran anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pembangunan manusia. Di samping itu, penelitian ini sebagai media aktualisasi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran ke dalam analisis empiris, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman penulis terhadap kebijakan fiskal daerah.

b. Bagi Pihak Praktisi

Diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait penganggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Studi ini dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan IPM, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas belanja daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta upaya pemerataan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur.



Intelligentia - Dignitas